1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNNYA DAN JASA SERTA RESIKO KEDEPAN.

1. INFLASI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG BERADA DI ZONA INFLASI BULUKUMBA TRIWULAN III-2026

2. PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA UNTUK TRIWULAN KE III-2026

Berdasarkan hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya selama periode Juli sampai dengan September 2026, perkembangan harga di Pasar Bonea Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan adanya perubahan harga pada beberapa komoditas, terutama kelompok hortikultura, sementara sebagian besar komoditas pangan pokok lainnya cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Pada kelompok bahan pangan pokok, seperti beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, dan beras SPHP Bulog, harga relatif tidak mengalami perubahan selama periode pengamatan. Harga beras berada pada kisaran Rp12.000 hingga Rp17.500 per kilogram, gula pasir sebesar Rp20.000 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp24.000 hingga Rp26.000 per liter, Minyakita Rp15.700 per liter, serta tepung terigu Rp12.000 per kilogram.

Perubahan harga yang paling menonjol terjadi pada kelompok komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang merah. Harga cabai merah keriting berada pada Rp45.000 per kilogram pada Juli dan Agustus, kemudian meningkat menjadi Rp60.000 per kilogram pada September. Cabai merah besar mengalami penurunan dari Rp60.000 per kilogram pada Juli menjadi Rp45.000 per kilogram pada Agustus, sebelum kembali meningkat menjadi Rp60.000 per kilogram pada September. Sementara itu, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari Rp30.000 per kilogram pada Juli menjadi Rp60.000 per kilogram pada Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi Rp80.000 per kilogram pada September. Perubahan harga tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor pasokan, kondisi cuaca, serta distribusi komoditas dari daerah pemasok.

Harga bawang merah mengalami penurunan secara bertahap dari Rp45.000 per kilogram pada Juli menjadi Rp40.000 per kilogram pada Agustus, kemudian kembali turun menjadi Rp35.000 per kilogram pada September. Adapun harga bawang putih Honan mengalami penurunan dari Rp45.000 per kilogram pada Juli menjadi Rp40.000 per kilogram pada

Agustus, kemudian bertahan pada tingkat harga yang sama hingga September.

Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras mengalami penurunan dari Rp37.000 per kilogram pada Juli menjadi Rp35.000 per kilogram pada Agustus, kemudian meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram pada September. Sementara itu, harga telur ayam ras tetap stabil sebesar Rp25.000 per kilogram dan harga daging sapi bertahan pada Rp140.000 per kilogram selama periode pengamatan. Pada kelompok komoditas perikanan, harga ikan bandeng dan ikan tongkol masing-masing tetap sebesar Rp50.000 dan Rp30.000 per kilogram. Adapun harga ikan teri dan udang basah juga tidak mengalami perubahan, masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp80.000 per kilogram.

Secara umum, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas strategis masih berada pada tingkat harga yang relatif stabil. Namun demikian, beberapa komoditas hortikultura masih mengalami fluktuasi harga, terutama cabai rawit merah dan cabai rawit hijau yang menunjukkan tren kenaikan selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika harga masih dipengaruhi oleh faktor ketersediaan pasokan, distribusi, dan kondisi musiman, sehingga pemantauan harga serta koordinasi pengendalian inflasi perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pada periode berikutnya.

Berikut Tabel Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya :

No	Komoditas	Juli	Agustus	September	Tren Triwulan III
1	Beras Medium (Cap Empat Delapan)	Rp13.500	Rp13.500	Rp13.500	Stabil
2	Beras Premium (Cap Ayam Jantan)	Rp17.500	Rp17.500	Rp17.500	Stabil
3	Beras SPHP Bulog	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Stabil
4	Cabai Merah Keriting	Rp45.000	Rp45.000	Rp60.000	Fluktuatif (naik pada September)
5	Cabai Merah Besar	Rp60.000	Rp45.000	Rp60.000	Fluktuatif (turun, kemudian naik)
6	Cabai Rawit Merah	Rp30.000	Rp60.000	Rp80.000	Fluktuatif (naik bertahap)
7	Cabai Rawit Hijau	Rp30.000	Rp60.000	Rp80.000	Fluktuatif (naik bertahap)
8	Bawang Merah	Rp45.000	Rp40.000	Rp35.000	Turun bertahap
9	Gula Pasir Curah	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Stabil
10	Minyak Goreng Premium	Rp26.000	Rp26.000	Rp24.000	Turun
11	Minyakita	Rp15.700	Rp15.700	Rp15.700	Stabil
12	Tepung Terigu	Rp12.000	Rp12.000	Rp12.000	Stabil
13	Daging Ayam Ras	Rp37.000	Rp35.000	Rp40.000	Fluktuatif (turun, kemudian naik)
14	Telur Ayam Ras	Rp25.000	Rp25.000	Rp25.000	Stabil

15	Daging Sapi	Rp140.000	Rp140.000	Rp140.000	Stabil
16	Ikan Bandeng	Rp50.000	Rp50.000	Rp50.000	Stabil
17	Ikan Tongkol	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Stabil
18	Ikan Teri	Rp150.000	Rp150.000	Rp150.000	Stabil
19	Bawang Putih Honan	Rp45.000	Rp40.000	Rp40.000	Turun, kemudian stabil
20	Udang Basah	Rp80.000	Rp80.000	Rp80.000	Stabil

3. RESIKO KEDEPAN

Memasuki Triwulan IV Tahun 2026 (Oktober–Desember), terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu sebagai berikut::

1. Risiko Gangguan Pasokan Akibat Kondisi Cuaca dan Transportasi Laut

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar pasokan pangan berasal dari luar daerah. Memasuki Triwulan IV, kondisi cuaca yang tidak menentu disertai potensi gelombang laut tinggi dan angin kencang, berisiko menghambat kelancaran transportasi laut dan distribusi barang kebutuhan pokok, baik dari luar daerah maupun antarpulau. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi ketersediaan stok dan meningkatkan biaya distribusi komoditas di tingkat konsumen.

2. Potensi Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura

Komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang, masih berpotensi mengalami fluktuasi harga akibat perubahan kondisi cuaca, produksi di daerah pemasok, serta kelancaran distribusi. Berdasarkan perkembangan harga pada Triwulan III, komoditas cabai rawit merah dan cabai rawit hijau menunjukkan tren kenaikan hingga September 2026. Oleh karena itu, perkembangan pasokan dan harga komoditas tersebut perlu terus dipantau untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

3. **Risiko Kenaikan Harga Akibat Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah**

Sebagian besar kebutuhan pangan strategis di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipenuhi melalui pasokan dari luar wilayah. Perubahan harga di daerah produsen, kenaikan biaya transportasi, maupun gangguan distribusi akibat kondisi cuaca berpotensi memengaruhi harga komoditas di tingkat konsumen, terutama beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, bawang, serta komoditas pangan lainnya. Risiko tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat keterbatasan akses distribusi di wilayah kepulauan dapat mempercepat dampak gangguan pasokan terhadap perkembangan harga di pasar.

4. **Potensi Peningkatan Permintaan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Akhir Tahun**

Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, peningkatan permintaan masyarakat berpotensi terjadi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Peningkatan kebutuhan terhadap bahan

pangan, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir, serta komoditas lainnya dapat memberikan tekanan terhadap harga apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai. Selain itu, kondisi cuaca pada akhir tahun yang berpotensi menghambat distribusi dapat memperbesar risiko ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar.

Secara umum, risiko pada Triwulan IV Tahun 2026 diperkirakan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kelancaran distribusi, kondisi cuaca dan transportasi laut, dinamika pasokan komoditas hortikultura, serta potensi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan stok secara berkelanjutan, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sesuai kebutuhan, serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil identifikasi yang Tim Pengendalian Inflasi Daerah setidaknya ada 2 situasi dan kondisi utama yang seringkali menjadi kendala atau permasalahan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. KETERGANTUNGAN PADA PASOKAN EKSTERNAL

Kepulauan Selayar belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pokok dari produksi lokal, sehingga Beberapa komoditas bahan pokok termasuk beras, cabai, Bawang Merah dan lain-lain, rata-rata berasal dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini membuat harga rentan naik jika terjadi fluktuasi pasokan dan gangguan distribusi.

2. KONDISI GEOGRAFIS, INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI SERTA ANOMALI CUACA

Sebagai daerah kepulauan, distribusi barang kebutuhan pokok bergantung pada transportasi laut yang rentan terhadap cuaca buruk. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan daerah-daerah yang dapat dijangkau melalui lintas darat. Kondisi ini menyebabkan biaya logistik tinggi dan potensi keterlambatan pasokan, yang pada akhirnya menyebabkan “kelangkaan” di masyarakat yang tentunya bermuara pada terjadinya kenaikan harga. Anomali cuaca buruk tidak hanya membuat Nelayan susah melaut, tetapi juga memutus jalur distribusi utama. JARAK + CUACA = tantangan ganda.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya preventif sekaligus sebagai skenario antisipatif untuk mencegah terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga yang dikhawatirkan dapat memicu inflasi di daerah, sepanjang Triwulan III 2026, telah dilaksanakan beberapa upaya dan strategi melalui program kerja dan kegiatan sebagai berikut:

1. RAPAT KOORDINASI MINGGUAN PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	Senin, 6 Juli 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
2	Senin, 13 Juli 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
	Senin, 20 Juli 2026		
3		Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
4	Senin, 27 Juli 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
5	Selasa, 4 Agustus 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
6	Senin, 10 Agustus 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
7	Selasa, 18 Agustus 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	

8	Senin, 24 Agustus 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
9	Senin, 7 September 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
10	Senin, 14 September 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
11	Senin, 21 September 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	
12	Kamis, 24 September 2026	Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting. Agenda terkait pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2026	

2. GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1	Kamis, 9 Juli 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.	
2	Senin, 20 Juli 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.	

3	Selasa, 4 Agustus 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
4	Kamis, 13 Agustus 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
5	Selasa, 8 September 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
6	Selasa - Rabu, 22-23 September 2026	Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Keterangan Pelaksanaan :

Pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengantisipasi potensi kenaikan harga dan gejolak harga komoditas pangan strategis.

Selama Triwulan III Tahun 2026, kegiatan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Pelaksanaan kegiatan melibatkan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta didukung oleh instansi terkait, distributor, dan pelaku usaha pangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan GPM diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mendukung kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Secara umum, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada Triwulan III Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan tekanan kenaikan harga dapat diminimalkan serta kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA DAN STOK PASOKAN

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara rutin melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, distributor, serta sentra produksi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan perangkat daerah terkait sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kelancaran distribusi, dan menjamin kecukupan pasokan pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Triwulan III Tahun 2026, pemantauan difokuskan pada perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, daging ayam ras, telur ayam ras, serta komoditas pangan lainnya yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah. Pemantauan dilakukan secara berkala di Pasar Sentral Bonea, pusat-pusat perdagangan, distributor, dan lokasi usaha yang menjadi titik utama distribusi bahan pangan.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan dialog langsung dengan pedagang, distributor, pelaku usaha, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga, ketersediaan stok, pola pasokan, serta kendala distribusi yang dihadapi. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan atau fluktuasi harga, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

Hasil pemantauan selama Triwulan III Tahun 2026 menjadi bahan evaluasi bagi TPID Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menentukan langkah-langkah antisipatif dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat, memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, serta mengendalikan gejolak harga guna mendukung stabilitas ekonomi daerah selama Triwulan III Tahun 2026.

.

DOKUMENTASI PEMANTAUAN DAN STOK BAPOKTING:

4. PENINJAUAN USAHA PETERNAKAN

Pada Triwulan III Tahun 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Stakeholder terkait melaksanakan peninjauan usaha peternakan ayam petelur Tanjung Harapan yang dikelola oleh BUMDes Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, pada tanggal 20 September 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pengembangan usaha produktif desa yang berpotensi mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Usaha peternakan tersebut dikembangkan melalui penyertaan modal desa kepada BUMDes sebesar kurang lebih Rp100 juta, dengan memanfaatkan kerja sama penggunaan lahan milik masyarakat setempat. Saat peninjauan, peternakan mengelola sekitar 1.500 ekor ayam dengan produksi mencapai 900–1.000 butir telur per hari. Sebagian hasil produksi telah dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buki sebanyak 5.000 butir per minggu dengan harga Rp50.000 per rak. Selain menghasilkan telur, kotoran ayam juga dimanfaatkan sebagai pupuk.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah mengapresiasi pengembangan usaha peternakan yang dinilai mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat, memperkuat ketersediaan pangan lokal, serta menyediakan pasar bagi produk peternak melalui pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyerapan hasil produksi oleh SPPG diharapkan dapat mengurangi kendala pemasaran yang sebelumnya dihadapi peternak sekaligus menjaga perputaran ekonomi di daerah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong desa-desa lain agar mengembangkan usaha produktif sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Pengembangan peternakan ayam petelur diharapkan dapat meningkatkan produksi telur lokal, memperkuat rantai pasok pangan, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta mendukung stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

DOKUMENTASI:

5. **RAPAT KOORDINASI PENANGANAN KELANGKAAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN BBM DAN BBG**

Pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada SPBU/APMS dan LPG Tabung 3 Kilogram, pada Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menindaklanjuti permasalahan kelangkaan dan antrean BBM serta kendala distribusi LPG 3 kilogram yang dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat pengawasan agar penyaluran energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Rapat membahas kondisi distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram di Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran pasokan di wilayah kepulauan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah meningkatnya antrean kendaraan pada saat kapal tanker tiba dan proses pengisian BBM berlangsung. Selain itu, dibahas pula kesesuaian kuota BBM dengan kebutuhan dan data penyaluran masing-masing APMS, transparansi distribusi, serta kendala teknis pengangkutan BBM menuju wilayah kepulauan, termasuk ketentuan kapal dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan distribusi.

Permasalahan LPG 3 kilogram turut menjadi pembahasan, khususnya terkait penolakan tabung yang mengalami karat atau dinilai tidak layak serta penerapan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah daerah menekankan pentingnya penyelesaian persoalan kelayakan tabung sesuai ketentuan dan kewenangan pihak terkait, serta memastikan penyaluran LPG dilakukan dengan memperhatikan ketentuan harga yang berlaku agar masyarakat tidak dirugikan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, H. Muhtar, M.M., yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI, pengelola APMS, dan pihak terkait lainnya dalam menangani persoalan distribusi BBM dan LPG. Penguatan koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran, serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan, termasuk potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penanganan dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing

pihak.

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, unsur Polres Kepulauan Selayar, termasuk Kasat Intel, unsur Kodim 1415 Kepulauan Selayar, termasuk Pasi Intel, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar melalui Kasi Datun dan pemangku kepentingan terkait. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berharap penanganan kelangkaan BBM dan kendala distribusi LPG 3 kilogram dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga dan dampaknya terhadap stabilitas harga serta inflasi daerah dapat diminimalkan.

DOKUMENTASI :

6. **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI PADA SPBU/APMS DAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan rapat koordinasi Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) serta LPG Tabung 3 Kilogram. Rapat koordinasi dilaksanakan pada Senin, 28 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Abdurrahman. Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Selatan untuk memperkuat pengawasan dan mengatasi permasalahan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai permasalahan penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram, terutama kendala distribusi yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan. Permasalahan yang menjadi perhatian meliputi konsentrasi penyalur utama di wilayah daratan, keterbatasan agen dan subpenyalur di wilayah pulau, ketergantungan pada transportasi laut, serta lemahnya pengawasan terhadap penjualan BBM menggunakan drum. Selain itu, dibahas pula indikasi pengisian BBM bersubsidi secara berulang oleh kendaraan tertentu dan perlunya optimalisasi sistem barcode untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran.

Sebagai langkah penanganan, rapat mendorong penguatan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, pembatasan pengisian berulang yang tidak sesuai ketentuan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola APMS. Selain itu, dibahas usulan pengembangan infrastruktur dan sistem distribusi energi, antara lain pembangunan SPBU di wilayah kepulauan, penataan subpenyalur dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap pulau, digitalisasi rekomendasi penyaluran, pembangunan depo BBM, serta pengembangan program BBM Satu Harga. Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa usulan pembangunan depo BBM dan fasilitas pengisian LPG telah diajukan kepada pemerintah pusat.

Pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram berlangsung secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga mendukung pengendalian inflasi daerah, mengingat kelancaran pasokan energi berpengaruh terhadap biaya transportasi, distribusi barang kebutuhan pokok, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan sistem distribusi yang lebih efektif, diharapkan kendala pasokan energi di wilayah kepulauan dapat diminimalkan sehingga tekanan kenaikan biaya logistik dan harga barang di tingkat konsumen dapat diantisipasi.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Abdurrahman, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Polres Kepulauan Selayar, Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Syahbandar, perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pengelola APMS.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama Triwulan III Tahun 2026 secara umum diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga, ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan kelancaran distribusi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga dan stok, serta melaksanakan berbagai langkah pengendalian, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan distribusi di wilayah kepulauan.

1. Aspek Ketersediaan Pasokan

Dari sisi ketersediaan pasokan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui TPID terus melakukan pemantauan terhadap stok barang kebutuhan pokok dan berkoordinasi dengan distributor, Bulog, pelaku usaha, serta perangkat daerah terkait. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketersediaan pangan dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Selain pangan, ketersediaan BBM dan LPG turut menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait terus diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

2. Aspek Keterjangkauan Harga

Dari aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan melaksanakan langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kondisi di lapangan. Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga secara berkala, serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha menjadi bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan biaya transportasi, operasional usaha, dan distribusi barang kebutuhan pokok. Melalui pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi hambatan distribusi yang berpotensi meningkatkan biaya logistik dan memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.

3. Aspek Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan distribusi barang kebutuhan pokok dan energi sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga kondisi cuaca, gelombang tinggi, dan keterbatasan sarana transportasi berpotensi memengaruhi kelancaran pasokan.

Pada Triwulan III Tahun 2026, pemerintah daerah turut memberikan perhatian terhadap

permasalahan distribusi BBM dan LPG melalui pemantauan lapangan, evaluasi kondisi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pembentukan dan koordinasi Satgas Pemantauan dan Pengawasan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran penyaluran energi dan distribusi barang kebutuhan pokok, sekaligus meminimalkan potensi hambatan pasokan yang dapat memengaruhi stabilitas harga di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. **Aspek Komunikasi Efektif**

Pada aspek komunikasi efektif, TPID Kabupaten Kepulauan Selayar terus memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antara perangkat daerah, instansi vertikal, Bulog, distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga, kondisi pasokan, kelancaran distribusi, dan potensi permasalahan yang dapat memengaruhi stabilitas harga.

Penguatan komunikasi lintas sektor juga dilakukan dalam penanganan permasalahan distribusi BBM dan LPG melalui koordinasi pemerintah daerah bersama unsur terkait. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya pengawasan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Komunikasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi gejolak harga dan mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi secara lebih terkoordinasi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Triwulan III Tahun 2026 difokuskan pada penguatan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemantauan harga dan stok, Gerakan Pangan Murah, pengawasan distribusi BBM dan LPG, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Meskipun demikian, tantangan berupa ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, kondisi geografis kepulauan, potensi gangguan transportasi laut, dan fluktuasi harga komoditas tertentu masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan efektivitas distribusi, serta optimalisasi peran TPID dalam mengantisipasi potensi gejolak harga guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI/RENCANA PENGENDALIAN INFLASI KEDEPAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan III Tahun 2026, pengendalian inflasi pada Triwulan IV perlu difokuskan pada upaya menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Memperhatikan karakteristik Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, diperlukan langkah-langkah pengendalian yang antisipatif melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), sebagai berikut:

1. Memperkuat pemantauan harga dan stok komoditas strategis secara berkala di pasar tradisional, distributor, dan gudang Bulog untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan barang kebutuhan pokok, khususnya komoditas pangan yang rentan mengalami fluktuasi harga.
2. Melaksanakan intervensi pasar secara terukur melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan, terutama apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi mengganggu keterjangkauan pangan dan daya beli masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Bulog, distributor, pemasok, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga ketersediaan pasokan serta mengantisipasi keterlambatan distribusi komoditas pangan yang berasal dari luar daerah.
4. Memperkuat kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok antarpulau melalui koordinasi dengan instansi terkait dan pelaku jasa transportasi laut, terutama dalam mengantisipasi kondisi cuaca dan gelombang tinggi yang berpotensi menghambat pengiriman barang serta meningkatkan biaya distribusi.
5. Mengoptimalkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram melalui koordinasi Satgas dan instansi terkait untuk mendukung kelancaran penyaluran, mengantisipasi hambatan distribusi, serta memastikan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan meminimalkan potensi peningkatan biaya transportasi serta logistik.
6. Mengoptimalkan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui rapat evaluasi, pemantauan lapangan, dan pertukaran informasi secara berkala sebagai dasar penyusunan langkah pengendalian yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
7. Mendorong peningkatan produksi dan pemanfaatan komoditas pangan lokal, khususnya hortikultura dan komoditas pangan strategis lainnya, melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Melalui pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terus terjaga. Penguatan koordinasi lintas sektor, pengawasan distribusi pangan dan energi, serta antisipasi terhadap potensi gangguan transportasi laut diharapkan mampu meminimalkan risiko gejolak harga

pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.